

Fauzan Zakaria

ideas
PUBLISHING

POLA KEMITRAAN **AGRIBISNIS**



POLA KEMITRAAN AGREBISNIS

Fauzan Zakaria



IP.218.10.2015

Pola Kemitraan Agribisnis

Fauzan Zakaria

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Oktober 2015

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo

Telp/Faks. 0435 830476

e-mail: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, Februari 2014

ISBN : 978-602-0889-28-3

Penata Letak: Dede Yusuf

Ilustrasi, dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala Rahmat serta karunia-Nya. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad saw. juga semua keluarga, sahabat serta pengikutnya, semoga Allah Swt. membukakan pintu Rahmat-Nya dan kita selalu mendapat limpahan berkah-Nya. Amin.

Ucapan terima kasih kepada semua anggota keluarga yang memberikan dukungan bagi penyelesaian buku ini. Berbagai usaha dilakukan dalam penyempurnaan buku ini dengan bantuan berbagai pihak yang turut berpartisipasi terkait dengan merampungkan tulisan ini.

Dalam hal ini penyusun menyadari akan kekurangan dan keterbatasannya, sehingga pasti saja buku ini belum sempurna susunan maupun isinya, maka untuk hal ini penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para ahli untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan buku ini. Harapan penyusun semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pembaca.

Gorontalo, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I

PROGRAM KEMITRAAN AGRIBISNIS..... 1

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN AGRIBISNIS
DI PROVINSI GORONTALO..... 5

BAB III

AGRIBISNIS BERBASIS KELAPA..... 9

BAB IV

KEMITRAAN USAHA 13

BAB V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41

BAB VI

KARAKTERISTIK KELUARGA PETANI
YANG DITELITI 55

BAB VII

DESKRIPSI PENDAPATAN PETANI KELAPA
SEBELUM DAN SAAT MELAKUKAN PROGRAM
KEMITRAAN..... 63

DAFTAR PUSTAKA 73



BAB I

PROGRAM

KEMITRAAN AGRIBISNIS

Program Kemitraan Agribisnis telah tumbuh sejak tahun 1970-an. Menurut Bakarsyah (1997), prinsip kemitraan diterapkan pertama kali dalam pengembangan perkebunan tebu rakyat di Jawa Timur dan kemudian menjadi program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Pada awal tahun 1974, program kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dikembangkan dengan mengacu pada pola TRI dan kemudian diperluas untuk seluruh komoditas sektor pertanian. Awal tahun 1980 dibangun program kemitraan industri kecil dan perdagangan serta koperasi dengan dukungan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK). Sejak saat itu, program kemitraan diterapkan pada hampir semua sektor pertanian, sektor industri, serta usaha kecil menengah dan koperasi. Perkembangan program ini mencapai puncaknya dengan diterbitkannya kebijakan kemitraan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/1997 tentang Kemitraan, yang mengatur pola kerja sama dengan prinsip kemitraan untuk UKMK.

Kebijakan program kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Kebijakan ini berisi: aturan main, jaminan hak serta kewajiban perusahaan inti dan plasma, pola hubungan sinergi antara perusahaan inti dan plasma, serta mendudukan peranan pemerintah sebagai pembina dan fasilitator sekaligus pendukung dana program kemitraan. Kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk PP tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan investasi pembangunan ekonomi dengan melibatkan usaha-usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk; membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara politik dari sisi pembangunan sektor pertanian, program ini merupakan upaya pemberdayaan petani dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara perusahaan besar agroindustri dan petani kecil. Bagi petani dan UKMK, program kemitraan merupakan harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang pengembangan usaha pada kondisi keterbatasan lahan dan modal.

Sebagai suatu kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas, tujuan utama program kemitraan agribisnis adalah untuk membantu memecahkan masalah ketimpangan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta ketimpangan pendapatan. Secara makro, program kemitraan akan dapat berperan dalam pengurangan ketimpangan-ketimpangan tersebut, karena program ini menganut prinsip kesinergian dan saling ketergantungan. Prinsip kesinergian yang diinginkan oleh program kemitraan masih sebatas norma, yaitu langkah-langkah normatif yang sebaiknya harus dilakukan, belum dirumuskan dalam bentuk konsep ekonomi, ukuran, kriteria, monitoring dan evaluasi di lapangan.



BAB II

PROGRAM KEMITRAAN

AGRIBISNIS DI PROVINSI GORONTALO

Program kemitraan agribisnis berkembang cepat di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo, hanya ada satu perusahaan menengah sektor pertanian yang terlibat dalam program kemitraan. Perusahaan ini mengusahakan jenis komoditas agribisnis yang berbahan baku kelapa yang sebagian besar seluruhnya mengandalkan pasokan bahan baku dari petani.

Kabupaten Gorontalo yang merupakan wilayah dari Provinsi Gorontalo memiliki luas pertanaman kelapa terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo. berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2004 bahwa luas areal tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo mencapai 27.654,9 Ha dengan tingkat produksi 24.892,6 dan produktifitas mencapai 1.641 kg/ha, untuk lebih jelasnya data areal dan produksi kelapa di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1.

Pada skala mikro keadaan perkelapaan sebagaimana yang digambarkan di atas berdampak pada pendapatan petani, ditambah lagi dengan masalah lapangan yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Gorontalo seperti keterbatasan lahan usaha tani dalam skala ekonomi, pemilikan lahan pertanian yang terpecah (*fragmented*), rendahnya penguasaan teknologi oleh petani, serta persaingan dalam aspek pemasaran, distribusi, dan rendahnya pendapatan atau kesejahteraan petani, masalah lain adalah keterkaitan petani sebagai produsen utama bahan baku kelapa dengan industri pengolahan belum menunjukkan kemitraan yang harmonis. Petani masih sebagai pihak yang menanggung resiko yang besar bila terjadi penurunan harga dan produk akhir yang dihasilkan oleh pabrik. Sebaliknya perubahan harga yang membaik pada sub sistem hilir tidak berpengaruh terhadap perubahan harga di tingkat petani.

Kondisi riil keberadaan pendapatan petani kelapa pada kelompok usaha bersama di Kabupaten Gorontalo sebelum dan saat melakukan program kemitraan, dimana pendapatan/produktivitas sebelum melakukan kemitraan rendah disebabkan karena permasalahan harga dan pasar input serta output. Sebelum melakukan program kemitraan konsep kemitraan yang terbangun

adalah tipe dispersal. Tipe dispersal yaitu suatu tipe yang dapat diartikan sebagai pola hubungan antar pelaku usaha yang satu sama lain tidak memiliki ikatan formal yang kuat (Darmono, 2004). Sehingga kecenderungan yang sifatnya eksploitatif bisa saja terjadi yang menjurus pada kematian usaha. Begitu juga dengan volume produksi yang dihasilkan ketiga KUB kecil disebabkan karena jaminan pasar dan ini berimplikasi pada pendapatan petani. Sedangkan saat melakukan kemitraan melalui program kemitraan pendapatan petani itu diharapkan meningkat karena prinsip-prinsip kesinergian, saling menghargai, saling mempercayai dan saling menguntungkan, serta saling ketergantungan akan terbangun.

Berbagai pernyataan di atas memerlukan suatu kajian yang komprehensif tentang peranan program kemitraan terhadap pendapatan petani. Apakah kebijakan membangun program kemitraan sebagai suatu kelembagaan kemitraan dapat dikembangkan sebagai suatu kebijakan umum (*publik policy*) dan bagaimana pendapatan dan kesejahteraan petani plasma yang melaksanakan program kemitraan.

Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting artinya, agar kebijaksanaan yang dibuat memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi, tidak terkesan

mubazir, dan dapat diterapkan. Upaya untuk mengurangi kerugian bagi para pihak yang bermitra dan menemukan serta mengembangkan model kemitraan agribisnis yang sinergis akan merupakan suatu upaya penting dan sangat strategis bagi program kemitraan agribisnis pertanian di Indonesia.

Oleh karena itu, buku ini akan membahas tentang peranan program kemitraan terhadap pendapatan petani. Kajian dalam buku ini merupakan hasil dari penelitian berupa tesis.



BAB III

AGRIBISNIS BERBASIS KELAPA

A. Konsep Agribisnis

Konsep Agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh dan di dalamnya terdapat beberapa sistem Agribisnis yang merupakan suatu totalitas kesatuan kerja Agribisnis yang terdiri atas (1) Sub Sistem Agribisnis Hulu (Off Farm Hulu) berupa kegiatan input produksi, informasi dan teknologi, (2) Sub Sistem usaha tani (on-farm) berupaka kegiatan produksi pertanian parmer, (3) sub sistem Agribisnis Hilir (Off-Farm Hilir) berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran, dan (4) Sub-sistem penunjang. Termasuk dalam sub-sistem hulu adalah industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian dalam arti luas seperti perbenihan, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian, pembangunan pertanian selam aini lebih didominasi oleh sub-sistem usaha tani (on-farm), oleh karena itu pembangunan pertanian ke depan lebih diarahkan kepada semua sub-sistem Agribisnis.

Saragih (2001) menyatakan bahwa pengembangan Agribisnis ditujukan dalam rangka

mengantisipasi cara perdagangan bebas yang menuntut adanya harga saing produk pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga sektor pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga faktor pertanian mampu menjadi inovator penggerak pembangunan nasional dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan dari kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya.

B. Kebijakan Pembangunan Agribisnis

Kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha Agribisnis secara langsung membawa konsekuensi diperlukannya dukungan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan Agribisnis dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan Agribisnis tersebut, diperlukan pengembangan sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang telah ada.

Saragih (2001), menyatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif (Comparative Advantages) dalam banyak komoditas perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, teh, tembakau, kopi, dll. Pembangunan sistem Agribisnis dan

komoditi perkebunan tersebut merupakan suatu bentuk dari industrialisasi perkebunan dengan mengembangkan 4 (empat) sub-sistem Agribisnis perkebunan secara simultan dan harmonis. Keempat sub-sistem yang dimaksud adalah sub-sistem Agribisnis Hulu Perkebunan seperti industri Agro-Otomatif, Agro-kimia dan pembibitan tanaman perkebunan, sub sistem perkebunan atau usaha budidaya perkebunan, sub sistem Agribisnis Hilir perkebunan yakni industri pengolahan komoditas perkebunan dan perdagangannya dan sub-sistem jasa penunjang Agribisnis Perkebunan yakni kegiatan yang menghasilkan atau menyediakan jasa bagi ketiga sub-sistem Agribisnis perkebunan di atas seperti penelitian dengan pengembangan pendidikan dan pealtihan, perkreditan, transportasi, kebijakan ekonomi dan lain-lain.



BAB IV

KEMITRAAN USAHA

A. Konsep Kemitraan Usaha

Menurut Jafar (2000), Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kemitraan ini pengusaha menengah atau besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Strategi bisnis dalam kemitraan usaha dilakukan oleh dua belas pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra, dalam menjalankan etika

bisnisnya (Jafar, 2000). Untuk itu kedua belah pihak perlu memahami etika bisnis yang merupakan landasan moral dalam berbisnis.

Upaya untuk mewujudkan kemitraan telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain dengan lahirnya undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dimana khusus mengetahui kemitraan usaha yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997 pemerintah melalui berbagai departemen ditugaskan untuk membina dan sekaligus mendorong terlaksananya kemitraan usaha. Demikian pula berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemitraan diminta untuk turut serta berperan aktif merealisasikan terselenggaranya kemitraan usaha.

Manfaat kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. Apalagi di era globalisasi dimana tidak lagi dikenal batas-batas negara, tentunya usaha tani dituntut produktivitas dengan tingkat efisiensi tinggi. Bagi pengusaha kecil, termasuk petani/kelompok tani hal tersebut tidak mudah untuk mencapainya, sehingga kemitraan merupakan salah

satu strategi dan kiat memenangkan persaingan bebas tersebut.

Tidak hanya pengusaha kecil namun pengusaha besar pun dapat menikmati keuntungannya antara lain, penghematan biaya produksi, terjaminnya kuantitas dan kualitas bahan baku, menghemat modal investasi karena perusahaan tidak harus selalu menguasai faktor produksi dari hulu hingga hilir. Bagi pengusaha kecil, koperasi dan petani keuntungan yang dapat diperoleh yaitu meningkatnya kemampuan dan kewirausahaan pendapatan keluarga dan masyarakat pedesaan, produktivitas dan kualitas hasil, penguasaan teknologi, kemampuan memanfaatkan kredit dan penguasaan manajemen serta penyediaan lapangan kerja pada gilirannya kemitraan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat kecil.

Menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (1990) kemitraan berasal dari kata mitra (diangkat dari bahasa Jawa) "Mitro" yang berarti kawan kerja atau pasangan kerja. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra. Dalam Oxford Advanced Dictionary English (Hornby, 1987), partner diartikan dengan sangat bagus yaitu: *person who takes part with another or other in some activity, especially one of owners of a business.*

Sedangkan partnership diartikan lebih jauh lagi sebagai bentuk pernyataan untuk bermitra (State of being a partner) pengertian di atas sanggup diangkat kembali secara khusus, karena dalam implementasinya banyak sekali kerancuan pengertian tentang kemitraan yang diterjemahkan tanpa jiwa, lebih berpihak pada perusahaan inti semata-mata, belum mengangkat harkat pelaksana sebagai subjek, serta upaya-upaya pemberdayaan pelaksana yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia.

Hubungan kemitraan dari sisi persepsi responden sedikit disoroti dalam tesis ini. Persepsi menurut Krech (1962) pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya.

Menurut Duncar (1981), persepsi dapat merumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku, khususnya psikologi. Istilah ini digunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu

persepsi menjadi signifikan apabila diperluas dan jangkauan lima indra dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan akan berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari sisi mana melihatnya dan bersifat sangat subjektif. Walaupun demikian, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan atau terhadap perusahaan inti. Selanjutnya, dapat dievaluasi pola hubungan yang telah dilakukan dan dapat dirancang pola hubungan yang lebih baik menurut persepsi petani plasma.

Ketergantungan, menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (1990), adalah keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Pengertian ini perlu diangkat untuk memberi makna yang berbeda tentang program kemitraan yang selama ini hanya (banyak) melihatnya dari sisi kepentingan perusahaan inti dan ekonomi makro tetapi mengenyampingkan kepentingan petani plasma sebagai subjek kemitraan. Petani masih dianggap belum mampu menanggung beban risiko kerugian-tingginya modal dan teknologi-sehingga perlu bermitra dengan perusahaan inti yang dianggap mampu menanggung beban tingginya modal dan teknologi. Walaupun demikian, perusahaan inti tidak

mau menanggung risiko tersebut dialihkan kepada kelompok tani, perantara, atau petani plasma sebagai mitranya. Dari sisi konsep kemitraan, petani plasma sebagai mitra bisnis perusahaan inti, seharusnya merupakan bagian utuh dari kegiatan agribisnis itu, tidak boleh terpisahkan. Keuntungan perusahaan inti harus berarti pula keuntungan petani plasmanya; sebaliknya kerugian perusahaan inti harus pula dirasakan bersama oleh petani plasmanya. Konsep saling ketergantungan bisnis yang tinggi perlu dikembangkan dan bersamaan dengan itu harus diikuti dengan *rasa saling-ketergantungan* yang kuat dalam program kemitraan (*partnership*). Dengan demikian, pada akhirnya program kemitraan akan mampu diarahkan dalam bentuk pemberdayaan atau dalam membangun proses kemandirian petani plasma, yang selama ini dianggap lemah dan perusahaan inti dianggap kuat, sehingga kedudukan bermitra berlangsung tidak seimbang.

Secara teoritis, saling-ketergantungan ini merupakan bagian utuh dari sifat manusia sebagai masyarakat, dalam bentuk interaksi sosial atau proses sosial antarasesamanya. Interaksi sosial ada kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama (Kinball Young dan Raymond, 1959). Menurut Soekanto (1982),

manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya. Pola berfikir tertentu yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Petani plasma akan memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya dalam menyikapi program kemitraan. Pandangan semacam inilah yang akan banyak disoroti.

Dari sisi bisnis, interaksi sosial antara sesama pebisnis mutlak diperlukan untuk membangun hubungan bisnis sesamanya dan kemudian mengadakan pergaulan, berbicara, merumuskan bisnisnya, dan akhirnya berkembang menjadi suatu ketergantungan untuk kemudahan mencapai tujuan bersama. Persoalan yang timbul adalah, apakah interaksi sosial tersebut berkembang menjadi interaksi sosial agribisnis pada kedudukan yang setara (kesetaraan) antara perusahaan

inti dan petani plasma? Interaksi agribisnis yang terjadi saat ini dalam program kemitraan, menurut penulis, pada posisi atau kedudukan yang tidak setara dalam variabel penguasaan modal, teknologi, informasi dan risiko kegagalan. Akibatnya, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan karena adanya kebijakan untuk mendukung program kemitraan, seperti misalnya ke bijakan dari sisa kredit modal kerja dan fasilitas investasi. Perusahaan inti lebih menguasai informasi dan memiliki akses yang kuat pada sumber kebijakan (pemerintah). Sedangkan petani plasma, lebih merupakan pihak-pihak yang akan dirugikan, karena tidak menguasai informasi serta pada posisi yang lemah terhadap variabel modal, teknologi, informasi, dan akses pasar. Oleh sebab itu, untuk membangun kemitraan yang setara atau sinerjik, perlu dirumuskan terlebih dahulu secara jelas apakah sebenarnya kemitraan itu dan bagaimana bentuk ketergantungan atau kesinerjikan antara perusahaan inti dan plasma dari sisi modal, teknolofi, informasi, pasar, dan risiko dalam sistem agribisnis?

Menurut Wie (1992), kemitraan usaha awalnya dikembangkan oleh perusahaan Jepang pada awal dasawarsa 1970-an, yang terpusat pada industri-industri perakitan mobil pada tahap akhir (*end process activities*) yang pada umumnya merupakan kegiatan yang sangat

pada impor. Perkembangan industri ini disusul dengan tahap 'integrasi ke belakang', karena makin banyak masukan antara (*intermediate input*) yang sebelumnya diimpor kemudian dibuat di dalam negeri. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah strategi *Completely Knocked Down (CKD)* menjadi 'program penanggalan' (*delination program*) dan menggantikannya dengan masukan lokal (*local content*) yang murah untuk menekan biaya impor tergantikan yang semakin mahal. Proses ini akan berhasil apabila kemampuan teknologi dan manajerial industri-industri pemasok meningkat, sehingga barang-barang yang dihasilkannya dapat bersaing dengan barang impor. Di Indonesia, program penanggalan ini diberlakukan untuk industri mobil dan elektronika dengan mengacu pada keberhasilan Jepang dalam mengembangkan sistem subkontraktor yang efisien dan berhasil.

Menurut Friedman (1988), tingkat ketergantungan perusahaan induk pada perusahaan subkontraktor di Jepang berkembang berbeda. Tingkat ketergantungan yang tinggi terjadi pada sektor industri permesinan (*general machinery*) alat-alat mesin (*machine tools*) dengan tingkat ketergantungan sampai 90% untuk perusahaan terkecil yang memperkerjakan 1-3 tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang

digunakan subkontraktor maka semakin kecil ketergantungannya pada perusahaan induk. Contoh, pada industri manufaktur (*manufacture idustry*), tingkat ketergantungan hanya 605 pada subkontraktor yang memperkerjakan 300 orang tenaga kerja. Tingkat ketergantungan sub kontraktor pada perusahaan induk untuk industri mobil sangat tinggi tetapi untuk industri elektronika lebih rendah karena komponen yang dipasok lebih kecil dibandingkan dengan industri mobil. Pola ketergantungan semacam ini menarik untuk dianalisis dalam kemitraan agribisnis yang dikembangkan di Indonesia yang mengacu pada sistem subkontraktor otomotif di Jepang.

Pada awalnya, kemitraan usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra dalam kegiatan insdustri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Perbedaan yang mendasar dalam pola kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) adalah: pada sektor industri kerajinan. Pola ini lebih terfokus pada subsistem *input*, pengadaan bahan baku, dan pada subsistem *output*. Kemitraan agribisnis pun dikembangkan dengan pendekatan yang hampir sama dan dirancang memasuki semua sistem agribisnis.

Menurut Downey dan Erickson (1992), pendekatan agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor (*sub sistem*) yang saling tergantung secara ekonomis, yaitu subsistem masukan (*input*), produksi (*farm*), dan subsistem keluaran (*output*). Saragih (2001) mengembangkannya menjadi empat subsistem yang saling tergantung dengan menambahkannya menjadi empat subsistem yang saling tergantung dengan menambahkan tiga subsistem di atas dengan subsistem kelembagaan, baik kelembagaan atau organisasi perusahaan agribisnis maupun kelembagaan petani yang tergabung dalam kelompok tani pada suatu kegiatan agribisnis.

Pola kemitraan agribisnis di Indonesia berbeda dengan pendekatan sub kontraktor di Jepang. Di Jepang, kerja sama dilaksanakan berdasarkan kemampuan teknologi dan kualitas hasil subkontraktor dalam memasok produknya ke perusahaan induk; sedangkan di Indonesia, pola kemitraan agribisnis dibangun berdasarkan kesenjangan yang besar dalam permodalan, teknologi, efisiensi, dan sistem informasi yang dikuasai oleh petani (petani plasma) sebagai pemasok. Petani plasma pada umumnya dikategorikan petani miskin, kurang menguasai teknologi, tidak berdaya dalam bidang permodalan dan organisasi, serta

belum memiliki organisasi petani yang kuat. Oleh sebab itu, petani plasma perlu diorganisir untuk mengikuti program kemitraan. Pengertian sebaliknya adalah perusahaan (inti) memiliki manajemen dan organisasi yang baik dan modern serta menguasai berbagai akses modal, teknologi, dan informasi, sehingga perusahaan perlu dirangkul untuk membantu petani (yang miskin) tersebut. Sebagai seorang manajer, pimpinan perusahaan (inti) harus memiliki visi yang jelas dalam membangun program kemitraan. Manajer, menurut Drucker (1977) dalam hubungan dengan masyarakat pebisnis (*cooporate society*), tidak bertugas untuk memperkaya si miskin, tetapi membuat menjadi produktif. Pendekatan yang terakhir inilah yang perlu dikembangkan lebih lanjut; tidak hanya membuat petani plasma tergantung dalam semua subsistem pada perusahaan inti, tetapi membangun petani plasma mandiri, produktif, dan berkualitas.

B. Model Kemitraan Usaha

Sejalan dengan meningkatnya permuatan kelapa baik dalam bentuk segar dan produk hasil olahan jumlah industri pengolahan yang memanfaatkan kelapa sebagai bahan bakunya juga meningkat proses pemenuhan kelapa sebagai bahan baku industri dapat dilakukan

melalui kerjasama kemitraan usaha, antar petani/kelompok tani dengan perusahaan/industri yang mengolah bahan baku tersebut menjadi berbagai macam produk.

Model kemitraan kelapa yang terdapat saat ini merupakan kerjasama kemitraan antar petani/kelompok tani kelapa dengan perusahaan/industri pengolahan dalam bentuk yang masih sederhana.

Pada model kerjasama kemitraan ini, petani diwajibkan untuk menyediakan lahan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada, membandingkan varietas yang diminati oleh perusahaan industri pengolahan secara profesional, untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan mutu pihak perusahaan berkewajiban menyiapkan bibit bermutu, saprodi, modal, teknologi dan penyuluh/pendamping.

Kedua belah pihak akan mendapatkan haknya masing-masing. Pihak perusahaan akan mendapatkan bahan baku secara teratur dan terjamin, guna menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan mutu petani akan mendapatkan harga yang stabil, tidak tergantung waktu dan musim panen serta terjamin pemasaran hasil panennya.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra tergantung pada kesepakatan kedua belah

pihak kemitraan yang dilakukan disuatu tempat, tentunya berbeda dengan perusahaan industri pengolahan lainnya. Pada umumnya kemitraan yang terjalin, hanya berbentuk kontrak kerja pembelian oleh perusahaan pengolah belum banyak memberikan pembinaan maupun bimbingan teknis kepada petani.

Untuk meningkatkan upaya kemitraan tersebut mak a peran pemerintah daerah dan masyarakat./Asosiasi Kelapa yang telah terbentuk dimasing-masing daerah, diharapkan secara praktik melakukan pembinaan dan bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator untuk menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif.

Menurut Jafar (2000), upaya untuk mewujudkan kerjasama kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat membutuhkan kejelasan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut peran yang diharapkan dari masing-masing pihak adalah:

a) Peranan Pengusaha/Industri

Pengusaha/industri pengolahan diharapkan dapat berperan dalam hal alih teknologi, guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petani/kelompok tani dalam berbagai

bidang (kewirausahaan, manajemen, teknis produksi, dll) selain itu pabrik juga menyusun rencana usaha dan kebutuhan bahan baku pabrik yang dilaksanakan bersama dengan mitra usahanya dalam hal permodalan untuk pengembangan kemitraan usaha secara luas, pabrik/industri diharapkan dapat menyiapkannya. Apabila diperlukan pabrik/industri pengolahan dapat mencarikan pinjaman/kredit dan sekaligus bertindak sebagai Avalis.

Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha, menjamin pembelian hasil produksi petani/kelompok tani yang bermitra sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati bersama serta pengkajian dan informasi teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.

b) Peranan Kelompok Tani/Koperasi Tani

Dalam melaksanakan kemitraan ini, petani bergabung dalam kelembagaan kelompok tani, dan selanjutnya menjadi Asosiasi Petani Kelapa serta membentuk badan hukum menjadi koperasi Tani kelompok tani/koperasi tani selanjutnya dapat berperan dalam menyusun rencana usaha bersama, termasuk di

dalamnya pengaturan waktu tanam dan panen serta menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak industri. Untuk mencapai skala usaha ekonomi guna mendukung kebutuhan pasokan bahan baku ke pabrik, maka para petani harus melaksanakan kerjasama antar sesama petani/koperasi.

Peran lain dari kelompok tani/koperasi yang diharapkan dalam kemitraan tersebut adalah mereka harus dapat mengembangkan profesionalisme guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen, kewirausahaan dan teknis produksi. Dengan demikian dapat menjamin kelangsungan kebutuhan bahan baku dari segi kuantitas maupun kualitasnya untuk pabrik pengolahan ubi jalur dengan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya.

c) Peranan Pemerintah

Tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam kemitraan. Disini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator serta sebagai arbitrase di dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, bagi tumbuh kembangnya jalinan kemitraan usaha. Dengan demikian, kemitraan ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pemerintah diharapkan

dapat meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada pihak yang bermitra, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal penyediaan modal, pemerintah membantu dan memfasilitasi penyediaan modal baik dengan skim kredit lunak dari lembaga perbankan (Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah maupun Swasta lainnya atau *Micro Finance* dengan prosedur sederhana. sehingga diserap dan dimanfaatkan serta melakukan pengawasan pengembaliannya agar tidak ada tunggakan.

Selanjutnya pemerintah perlu mengadakan penelitian, pengembangan dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha, melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.

Pada bahian lain, pemerintah perlu mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik SDM aparat maupun petani/kelompok tani maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding dan sebagainya serta bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

C. Langkah-langkah Bermitra

Membangun terjalinnya kemitraan usaha antar petani/kelompok tani dengan industri pengolahan, memerlukan proses dan waktu. Menurut Jafar (2000), membangun dan mewujudkan kemitraan yang dicita-citakan dan sehat, harus diawali persiapan yang mantap dan ditambah dengan pembinaan. Kemampuan melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya dalam arti harus dibangun dengan sadar dan terencana dimanapun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis.

Untuk itu, tahapan-tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama, adalah melakukan identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha. Berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau komoditas yang akan diusahakan, potensi sumberdaya yang mendukung, tingkat kemampuan para pelaku usaha baik dibidang penguasaan IPTEK, permodalan, SDM maupun sarana prasarana lainnya dikumpulkan dan dianalisis. Dengan adanya berbagai data dan informasi ini, masing-masing pelaku usaha diharapkan dapat lebih saling mengenal

satu sama lain, sehingga dapat teridentifikasi pelaku usaha mana yang paling potensial untuk dijadikan mitra usaha. Data dan informasi ini juga berguna bagi para pelaku yang berminat untuk bermitra, melakukan pendekatan atau proses penjajakan menuju proses selanjutnya.

Selanjutnya pada tahap kedua, dibentuk wadah organisasi ekonomi yang merupakan suatu lembaga usaha yang solid menuju ke bentuk formal, selanjutnya berbadan hukum seperti misalnya koperasi. Dengan adanya legalitas ini, akan lebih memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan perusahaan mitra serta memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan perusahaan mitra serta memudahkan dalam mengakses sumber permodalan. Usaha dalam skala ekonomi akan membawa keuntungan antara lain meningkatkan efisiensi usaha karena dapat melakukan pengadaan input produksi, proses produksi sampai pemasaran secara bersama, sehingga meningkatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan posisi tawar dibandingkan melakukan usaha secara sendiri-sendiri.

Tahap ketiga, adalah menganalisis kebutuhan pelaku usaha, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan permasalahan-

permasalahan mendasar dalam pengembangan usaha yang dihadapi pelaku-pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar.

Tahap keempat, adalah merumuskan dan menyusun program bersama yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, pemberian konsultasi serta peningkatan koordinasi dan lainnya. Dengan program ini kapasitas manajerial dan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya di pedesaan, dapat ditingkatkan.

Dengan telah adanya program tersebut, maka sampai pada tahap kelima, kesiapan bermitra. Perlu disadari oleh pelaku usaha bahwa kemitraan bukan belas kasihan dari pelaku usaha besar/menengah seperti dalam lembaga sosial yang bersifat Cuma-Cuma. Pelaku usaha besarpun perlu menyadari bahwa adanya kemitraan dengan usaha kecil juga tidak semena-mena untuk memperoleh keuntungan. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa kemitraan merupakan suatu hubungan kerja dan peluang, dan juga menjadi ajang untuk belajar dan mengembangkan diri serta membina kekuatan/kelebihan yang dimiliki mitra usahanya. Kemitraan usaha juga memerlukan keseimbangan yang jelas antara kontribusi, proses partisipasi yang melibatkan semua pihak serta pembagian hasil yang

sepadan sesuai dengan kontribusi. Semua pihak harus dapat memberikan kontribusi, menata proses partisipasi, serta memperoleh pembagian hasil atau pembagian keuntungan sesuai kontribusinya.

Untuk mempertemukan pelaku-pelaku usaha yang telah siap mitra dilakukan Tahap Keenam, Temu usaha. Di dalam temu usaha akan diketahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dari kedua belah pihak. Pada kesempatan itu juga dapat dipertemukan secara langsung pemilik modal dan pihak perbankan dengan usaha kecil. Dari pertemuan itu diharapkan adanya kontrak kerjasama antara pelaku-pelaku usaha yang akan bermitra dan juga berkembangnya komoditi unggulan yang diminta pasar.

Tahap Ketujuh, melaksanakan atau melakoni kemitraan. Masing-masing pihak telah mengetahui manfaat, saling mengenal saling membutuhkan, sehingga tinggal melaksanakan dengan baik, sesuai peranan, seperti yang telah disepakati bersama.

Dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan usaha di daerah sangat diperlukan untuk mengembangkan kemitraan usaha. Oleh karenanya, perlu dikoordinasikan dengan seluruh instansi terkait dan stake holders lainnya mulai dari

tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Berbagai fasilitas atau kemudahan dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan-kemudahan lainnya koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga/instansi sering menjadi kendala dalam mengembangkan kemitraan usaha.

Berdasarkan pasal 4 keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, kemitraan usaha pertanian dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma.
2. Pola sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
3. Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan

perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.

4. Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
5. Pola kerjasama, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

Selain pola kemitraan usaha di atas terdapat pula pola waralaba yang merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra yang memberikan hak esensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan hubungan bimbingan manajemen (Hafsah, 2000).

Pola implementasinya dilapangan pola-pola kemitraan usaha tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kemitraannya baik pada sektor pertanian, industri maupun perdagangan. Menurut

Hafsah (2000), pola kemitraan usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah:

1. Pola kemitraan sederhana (Pemula), secara garis besar pola kemitraan ini perusahaan/pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama teknologi alat dan mesin untuk meningkatkan produksinya kepada pengusaha besar mitranya dengan jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.
2. Pola kemitraan tahap madya, merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana, dalam tingkatan madya ini usaha kecil telah mampu mengembangkan usaha muda dari merencanakan usaha sampai pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalin dengan usaha besar.
3. Pola kemitraan tahap utama, dalam pola ini pihak pengusaha kecil secara bersama-sama mempunyai potongan atau menanam modal usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham.

D. Pendapatan Petani Kelapa

Pada dasarnya petani kelapa menghendaki peningkatan pendapatan dalam agribisnis kelapa yang diusahakan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan produksi melalui pemahaman modal dan teknologi. Namun demikian produksi yang meningkat tidak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan kelapa, karena besarnya biaya produksi dan harga jual produk kelapa pada agribisnis berbasis kelapa. Apabila biaya produksi rendah dan atau harga jual produksi kelapa tinggi, maka pendapatan petani kelapa akan meningkat, demikian juga sebaliknya apabila biaya produksi tinggi atau harga produksi kelapa rendah maka pendapatan petani kelapa menurun.

Besarnya pendapatan petani kelapa pada agribisnis kelapa berhubungan erat dengan besarnya biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi dan penerimaan total yang diperoleh pendapatan petani kelapa adalah nilai bersih dari produksi total yang diterima dari kegiatan usaha tani kelapa, yang merupakan penerimaan total (*total revenue*) dikurangi biaya total (*Total Cost*) yang dikeluarkan dalam bentuk biaya tunai sedangkan penerimaan total (*Total Revenue*) adalah nilai dari produksi total yang merupakan harga per unit produksi dikalikan dengan jumlah unit produksi

(Debertin, 1986). Penerimaan total petani jagung tersebut termasuk pula nilai produksi yang dikonsumsi sendiri atau yang tidak dijual. Biaya total (*total cost*) merupakan semua korbanan yang dikeluarkan dalam semua proses kegiatan usaha tani pada agribisnis kelima mulai dari persiapan lahan hingga hasil panen dijual komponen biaya tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam bentuk biaya tunai. Menurut Sokartawi, et al (1986) pengeluaran total usaha tani (*total faren expenses*) didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Mubyanto (1995) mengemukakan bahwa tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam bentuk uang.

Permasalahan yang sering dihadapi petani kelapa pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan adalah terbatasnya permodalan manajemen usaha dan pemasaran hasil. Pada umumnya petani kelapa memiliki modal yang kecil sehingga mempengaruhi besarnya volume usaha yang dilakukan dan tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Mubyanto (1995) setelah tanah, modal adalah merupakan nomor yang sangat penting dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya

pada nilai produksi keluarga modal merupakan menyebabkan volume usaha dan tingkat teknologi yang digunakan juga rendah yang akan mengakibatkan produksi dan pendapatan yang rendah.

Demikian juga dengan kemampuan manajemen dan pemasaran hasil petani kelapa pada umumnya masih relatif rendah. Menurut Hermanto (1980) keterbatasan pendidikan dan pengalaman akan menutup cakrawala gagasan yang ada pada memori pikirannya, dengan ingatannya adalah pengalaman turun temurun, sosialisasi dari leluhurnya. Ia bertengger dalam posisi pemikiran dan gagasan apa adanya sehingga kurang mampu manajemen dan pemasaran hasil. Akibatnya pengelolaan agribisnis kelapa menjadi kurang baik sehingga tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang diharapkan.

E. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan alur pikir dari penelitian ini sebagaimana tersaji pada gambar 3 yang digunakan dalam pengajuan hipotesis penelitian bahwa pola kemitraan yang dibangun oleh pihak-pihak yang bermitra dalam hal ini petani sebagai plasma dan pengusaha/perusahaan sebagai inti melalui program kemitraan adalah merupakan alternatif yang tepat untuk peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa hipotesis:

- a) Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan ; 1) Aspek teknologi, 2) aspek SDM, 3) aspek permodalan, 4) aspek teknis, 5) aspek kepastian hukum dan 6) aspek pemasaran.
- b) Pola kemitraan yang terbangun dalam program kemitraan adalah pola inti plasma.
- c) Pendapatan petani kelapa meningkat saat melakukan program kemitraan.

BAB V

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Geografi

Kabupaten Gorontalo terletak antara $0^{\circ} 30' - 1^{\circ} 30'$ Lintang utara dan $121^{\circ} - 123^{\circ} 30'$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo

Luas Kabupaten Gorontalo adalah $3.426,98 \text{ km}^2$ atau 28.05% dari luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo sampai dengan tahun 2005 ini mempunyai 17 Kecamatan, dengan ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Limboto dengan luas wilayah adalah : $154,95 \text{ km}^2$ atau 4,52 % dari total luas Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo berada pada ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Gorontalo memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di Kecamatan Sumalata 4 pulau.

Kecamatan Kwandang 13 pulau dan Kecamatan Boliyohuto 1 pulau. Selain pulau-pulau kecil tersebut Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa sungai kecil yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango dan DAS Bone yaitu : Kecamatan Sumalata 9 sungai, Kecamatan Batudaa 3 sungai, Kecamatan Tibawa 3 sungai, Kecamatan Limboto 5 sungai, Kecamatan Telaga 3 sungai, Kecamatan Kwandang 8 sungai, Kecamatan Atinggola 2 sungai dan Kecamatan Boliyohuto 4 sungai.

B. Keadaan Iklim

Berdasarkan klasifikasi Oldeman dan Darmiyati, Kabupaten Gorontalo secara rata-rata beriklim relatif kering (E2) dengan rata-rata bulan kering 3 bulan per tahun dengan curah hujan lebih dari 200 mm per tahun. Rata-rata suhu minimum 23.8⁰ C dengan kelembapan relatif rata-rata mencapai 85.1⁰C.

C. Jenis Tanah

Berdasarkan data Peta Tanah Tinjau (skala 1 : 250.000) dengan sistem klasifikasi Dudal dan Suprptohardjo, tanah di Kabupaten Gorontalo diklasifikasikan dalam klasifikasi tanah Provinsi Gorontalo sebagai tanah Aluvial, Grumusol, Andosol,

Latosol, Podsolik dan Litosol. Secara spesifik tanah di Kabupaten Gorontalo umumnya dengan klasifikasi tanah Aluvial tersebar di Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Telaga Biru. Klasifikasi tanah untuk jenis tanah Latosol dan Grumusol tersebar di Kecamatan Anggrek, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Pulubala (Tibawa), Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Kwandang. Sedangkan klasifikasi tanah Podsolik tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Kecamatan Tolangohula.

Berdasarkan sifat-sifatnya, maka berbagai jenis tanah ini mempunyai kemampuan lahan yang bervariasi dari rendah sampai tinggi serta umumnya dapat dibudidayakan untuk berbagai tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan obat-obatan, walaupun sebagian diantaranya memerlukan usaha pengelolaan spesifik berdasarkan kendala faktor pembatas untuk masing-masing jenis tanah. Pembatas utama bagi pengembangannya adalah faktor kondisi lereng (Bappeda Kabupaten Gorontalo, 2001).

D. Tata Guna Lahan

Keadaan lahan di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo tahun 2003, meliputi lahan

sawah dan lahan kering yang tersebar di 17 kecamatan. Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Gorontalo berdasarkan jenis pengairan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Luas lahan sawah di Kabupaten Gorontalo tahun 2003

No	Jenis Pengairan (Irigasi)	Lahan Sawah	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Teknis	4.361	46.05
2	Setengah teknis	4.764	50.31
3	Sederhana	345	3.64
	Jumlah	9.470	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2003

Penggunaan lahan kering di Kabupaten Gorontalo sebagian besar digunakan untuk hutan negara dan lainnya digunakan untuk pekarangan, padang penggembalaan, kebun, tegalan, tambak, bangunan, rawa dan perkebunan. Luas lahan kering disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Penggunaan Lahan Kering di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2003

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bangunan/pekarangan/halaman	21.728	6.7
2	Tegalan	43.926	13.5
3	Ladang/Huma	26.198	8.03
4	Penggembalaan/Padang rumput	7.809	2.4
5	Rawa yang tidak ditanami	2.872	0.88
6	Tambak	676	0.21
7	Kolam/Tebat/Empang	120	0.04
8	Lahan kering sementara tidak ditanami	5.580	1.71
9	Tanaman kayu-kayuan	7.460	2.29
10	Hutan (Negara)	129.35	39.63
11	Perkebunan	9	11.1
12	Lain-lain	36.204	13.6
	Jumlah	326.418	100

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2003

E. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS tahun 2003 penduduk Kabupaten Gorontalo merupakan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo yaitu 415.672 jiwa atau 47.89 % dari total penduduk Provinsi Gorontalo dengan tingkat kepadatan 121 orang/km². Wilayah Kecamatan yang tertinggi jumlah penduduknya adalah Kecamatan Telaga dengan jumlah 38.157 jiwa atau 9.18 % dari total penduduk Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tolinggula dengan jumlah 11.810 jiwa atau 2.84% dari total penduduk Kabupaten Gorontalo. Keadaan penduduk menurut wilayah ini menunjukkan bahwa penduduk pada umumnya mendiami wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Secara rini jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo dari tahun 2002 – 2003 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Penduduk Kabupaten Gorontalo menurut Kecamatan dari tahun 2002-2003 (orang).

No	Kecamatan	Tahun	
		2002	2003
1	Batudaa Pantai	17.854	18.225
2	Batudaa	26.314	26.540
3	Bongomeme	32.554	33.045
4	Tibawa	55.314	34.260
5	Pulubala	-	22.683
6	Boliyohuto	22.980	22.349
7	Mootilango	16.591	16.575
8	Tolangohula	28.516	30.140
9	Sumalata	12.253	13.691
10	Tolinggula	11.772	11.810
11	Kwandang	32.235	32.574
12	Anggrek	16.823	17.136
13	Limboto	56.223	38.097
14	Limboto Barat	-	21.109
15	Telaga	36.283	38.169
16	Telaga Biru	21.173	22.654
17	Atinggola	16.087	16.617
	Kabupaten Gorontalo	388.337	415.672

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2003

F. Keadaan Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gorontalo tahun 2003. terdapat 10 sektor ekonomi yang menjadi lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo, seperti tersaji pada Tabel 5.4

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Gorontalo tahun 2003.

No	Lapangan Pekerjaan	Penduduk yang Bekerja	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian	75.769	39.2
2	Pertambangan dan	1.338	0.70
3	Penggalian	6.911	3.58
4	Industri Pengolahan	121	0.06
5	Listrik, Gas dan Air	2.237	1.16
6	Minum	16.258	8.42
7	Konstruksi	5.309	2.75
8	Bangunan	1.052	0.54
9	Perdagangan	13.743	7.12
10	Angkutan dan Komunikasi Keuangan dan Asuransi	70.338	36.4

	Jasa Kemasyarakatan Lain-lain		
	Jumlah	193.076	100

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2003

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 bahwa, sebagaimana wilayah lain di Provinsi Gorontalo, karakteristik penduduk di Kabupaten Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Data tahun 2003 menunjukkan, 75.769 orang atau 39.2 % tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo bekerja di sektor pertanian, jumlah ini mendominasi secara mutlak dari sektor ekonomi lainnya. Sedangkan sektor lapangan kerja lainnya menyerap tenaga kerja tertinggi setelah sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja sebesar 70.338 orang atau 36.4 %, sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.258 orang atau 8.42 %, sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 6.991 orang atau 3.58 %. Jika dilakukan klasifikasi antar sektor primer (pertanian dan pertambangan). Sektor industri dan jasa, maka pada umumnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Gorontalo didominasi oleh sektor primer.

Selanjutnya jika menggunakan data jumlah petani kelapa di Kabupaten Gorontalo sebanyak 24.508

kk dan diasumsikan tiap keluarga terdiri dari 2 tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sektor perkebunan kelapa adalah 49.016 orang atau 64.7 % dari total tenaga kerja di sektor pertanian.

G. Keadaan Ekonomi

Pengukuran tingkat perekonomian daerah biasanya didasarkan pada angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Untuk mendeskripsikan keadaan ekonomi Kabupaten Gorontalo digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 sebagaimana tersaji pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku tahun 2001 – 2003 (jutaan rupiah).

SEKTOR	TAHUN		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
1. Pertanian	304.713	347.224	378.308
Tanaman Bahan	119.900	146.196	163.944
Pangan	59.056	69.585	65.546
Tanaman	37.713	37.038	43.814

Perkebunan	60.307	57.379	66.386
Peternakan	33.647	37.026	38.619
Kehutanan	25.479	28.221	35.785
Perikanan	82.491	95.661	102.643
2. Pertambangan dan Penggalian	4.275	4.846	6.667
3. Industri Pengolahan	56.003	59.164	64.037
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	74.942	84.816	91.180
5. Bangunan	33.831	48.060	53.119
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.171	30.613	35.033
7. Pengangkutan dan Komunikasi	128.564	149.801	168.628
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan			
9. Jasa-jasa			
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	736.469	848.406	935.402

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2003.

Berdasarkan Tabel 4.5 PDRB Kabupaten Gorontalo masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesarnya. Pada tahun 2001

sumbangan sektor pertanian adalah 304.713 juta rupiah atau 41.4 % dari total PDRB, tahun 2002 sumbangan sektor pertanian naik menjadi 347.224 juta rupiah dan tahun 2003 meningkat menjadi lagi menjadi 378.308 juta rupiah. Sub-sektor perkebunan yang didalamnya termasuk tanaman kelapa, sumbangannya terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2001 adalah 59.056 juta rupiah, tahun 2002 naik menjadi 69.585 juta rupiah dan pada tahun 2003 sumbangannya menurun menjadi 65.546 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan petani dari sub-sektor perkebunan menurun sejalan dengan program Agropolitan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menitikberatkan pada sub-sektor tanaman pangan, sehingga banyak petani yang mengantungkan pendapatannya dari usahatani jagung termasuk petani kelapa.

Selain laju pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang dapat di jadikan untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pendapatan per kapita. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Berdasarkan data dari BPS bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Gorontalo selang tahun 2001 sampai tahun 2003 terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi. Tahun

2001 pendapatan per kapita sebesar 1.537.052 juta rupiah, tahun 2002 naik menjadi 1.771.050 juta rupiah dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 2.196.729 juta rupiah.

H. Keadaan Perkebunan

Kelapa merupakan tanaman perkebunan yang menjadi unggulan Kabupaten Gorontalo baik dilihat dari luas lahan maupun produksinya. Selain kelapa, tanaman perkebunan yang cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Gorontalo adalah cengkeh, kemiri, vanili dan sejumlah komoditi tanaman perkebunan lainnya. Keunggulan tanaman kelapa dari tanaman perkebunan lainnya.

Data pada Tabel 4.6 tersebut dapat dijelaskan bahwa luas perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo adalah 29.166.84 ha atau 71.41 % dari total luas lahan tanaman perkebunan. Dari luas tersebut terdapat 26.6 % tanaman yang belum menghasilkan (TBM). 59.2 % tanaman yang menghasilkan (TM), dan sisanya 14.1 % tanaman yang rusak atau sudah tua (TT/TR). Produksi tanaman kelapa tahun 2003 adalah 25.532.95 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 1.478 ton/ha. Dengan demikian dilihat dari luas lahan, produksi maupun produktivitas tanaman kelapa merupakan

komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan di Kabupaten Gorontalo.

BAB VI

KARAKTERISTIK KELUARGA PETANI YANG DITELITI

A. Umur Petani

Tingkat umur seseorang pada umumnya mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan, demikian pula pada petani, umur mempengaruhi ketrampilan dan kemampuan kerjanya, oleh karena itu umur petani merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan usaha tani yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini umur petani dikelompokkan menjadi tiga kelompok, dengan pertimbangan tiga kelompok tersebut berbeda dari segi kemampuan fisik dalam melaksanakan kegiatan usaha tani jagung. Untuk lebih jelasnya keadaan umur petani responden dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.2. Umur rata-rata petani responden

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kurang dari 30	4	20
2	30 – 55	14	70
3	lebih dari 55	2	10
	Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel 4.7.. terlihat bahwa sebagian besar responden berumur 30-55 tahun (70%) keadaan ini memungkinkan petani dapat mengelola usahataniya dengan baik, karena dari segi fisik mereka cukup kuat untuk mengusahakan usaha tani kelapa.

B. Pendidikan

Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi yang ditempuh oleh petani yang menjadi responden. Tingkat pendidikan dari responden dapat dilihat pada tabel 6.3

Tabel 6.3 Keadaan Pendidikan Formal Petani Responden

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak tamat	2	10
2	SD/ sederajat	8	40
3	Tamat	6	30
4	SD/ Sederajat	4	20
	Tamat		
	SLTP/ Sederajat		
	Tamat		
	SLTA/ Sederajat		
	Jumlah	20	100

Berdasarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan formal petani responden adalah tamat SD (40%), hal ini menunjukkan tingkat pendidikan formal petani responden tergolong rendah, masih rendahnya tingkat pendidikan ini merupakan kendala dalam penyerapan teknologi baru, terutama dalam bidang pengolahan hasil pertanian dalam meningkatkan kualitas pengolahan hasil tersebut.

Di samping pendidikan formal yang diikuti, petani responden juga mengikuti beberapa pendidikan non formal yang berupa pelatihan, kursus-kursus atau bimbingan yang berhubungan dengan peningkatan ketrampilan dan wawasan tentang agribisnis. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan non formal petani responden dapat dilihat pada tabel 6.4

Tabel 6.4 Keadaan Pendidikan Non Formal Petani Responden

No	Intensitas (Kali)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak pernah	-	-
2	1 – 2	4	20
3	3 – 4	10	50
4	Lebih dari 4	6	30
	Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel 4.9 di atas bahwa pendidikan non formal yang diikuti oleh responden petani berkisar 3-4 (50%), hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengikuti pendidikan non formal terutama menyangkut pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bidang pengolahan hasil pertanian.

C. Pengalaman Berusaha Tani

Pengalaman adalah waktu yang telah dihabiskan oleh seseorang dalam menekuni suatu bidang pekerjaan tertentu, pengalaman petani responden dalam berusaha tani kelapa diukur berdasarkan lamanya petani responden tersebut melakukan usahatani kelapa baik secara terus menerus atau kumulatif dari yang terputus-putus lamanya petani responden berusaha tani kelapa mempengaruhi kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan usahatani kelapa terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam berusaha tani.

Dalam penelitian ini pengalaman petani responden dalam berusaha tani kelapa dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan lamanya melaksanakan usahatani kelapa yaitu kurang, sedang, lama. Untuk lebih jelasnya pengalaman berusaha tani kelapa petani responden dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 6.5 Umur rata-rata petani responden

No	Lama Berusaha tani kelapa (Tahun)	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kurang dari 10	Kurang	2	10
2	10 – 20	Kurang	10	50
3	lebih dari 20	Kurang	8	40
	Jumlah		20	100

Berdasarkan tabel 4.10 di atas terlihat bahwa pengalaman berusaha tani kelapa petani responden sebagian besar selama 10-20 tahun (50%) termasuk kategori sedang, pengalaman berusaha tani dalam waktu tersebut sudah cukup membuat petani mampu melaksanakan usahatani dengan baik, karena dengan pengalaman akan meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha tani kelapa, mulai dari merencanakan, melaksanakan proses produksi, menganalisa permasalahan yang ada dan akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir resiko kegagalan sehingga dengan pengalaman berusaha tani kelapa tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan petani kelapa.

Apabila ditelusuri lebih mendalam dan dihubungkan dengan umur petani, ternyata pengalaman petani responden dalam berusaha tani sudah diperolehnya sejak kecil dan secara turun temurun dari orang tuanya.

D. Luas Lahan Usaha Tani Kelapa

Lahan merupakan modal dasar usaha dalam melaksanakan usaha tani kelapa. Luas lahan yang akan digunakan sangat menentukan besarnya faktor produksi lain yang akan digunakan. Selain itu luas lahan akan menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan petani.

Dalam penelitian ini luas lahan usaha tani kelapa petani responden dikur dengan satuan hektar, luasnya sama baik saat maupun sebelum melaksanakan kemitraan. Untuk jelasnya distribusi luas lahan usahatani kelapa petani responden dapat dilihat pada tabel 6.6

Tabel 6.6 Luas lahan usaha tani kelapa petani responden saat dan sebelum bermitra

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1.00	15	75
2	1.50	4	20
3	2.00	1	5
	Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel 4.11 di atas terlihat bahwa saat melaksanakan kemitraan, sebagian besar luas lahan usahatani kelapa diusahakan oleh petani

responden adalah 1 hektar (75%), yang merupakan standar minimum secara otomatis.

E. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan menunjukkan besarnya anggota keluarga yang harus dibiayai oleh kepala rumah tangga untuk kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lainnya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai tanggungan petani kelapa sebagai kepala rumah tangga adalah anak, istri dan keluarga lain yang tinggal serumah. Jumlah tanggungan keluarga petani responden dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan jumlah anggota keluarga petani responden yang bersangkutan, yaitu kategori sedang, dan banyak seperti disajikan pada tabel 6.7

Tabel 6.7 Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden

No	Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kurang dari 4	Kurang	8	40
2	4 - 5	Kurang	10	50
3	lebih dari 5	Kurang	2	10
	Jumlah		20	100

Berdasarkan Tabel 4.12. di atas menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga petani responden sebagian besar 4 – 5 orang (50%) yang termasuk dalam kategori keluarga sedang, dengan jumlah tanggungan keluarga petani responden tersebut dapat dikatakan bahwa petani membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai hidup keluarganya, oleh karena itu dibutuhkan aktivitas yang lebih besar dalam melaksanakan usaha tani sehingga harus memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi untuk mampu membiayai hidup keluarganya secara layak. Disisi lain bahwa jumlah tanggungan keluarga akan menentukan ketersediaan tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitas kegiatan usahanya.



BAB VII

DESKRIPSI PENDAPATAN PETANI KELAPA SEBELUM DAN SAAT MELAKUKAN PROGRAM KEMITRAAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan

- Aspek teknologi
Aplikasi teknologi berupa teknologi pembuatan nata mentah merupakan kunci lompatan produksi dan mutu nata mentah yang dihasilkan. Standar mutu yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini kualitas nata yang dihasilkan harus dilakukan oleh petani.
- Aspek SDM petani
Bukti nyata peningkatan SDM petani adalah meningkatnya keterampilan (*skill*) petani tentang pengelolaan usaha tani. Pembinaan petani/kelompok untuk mengorganisasi diri juga terbentuknya kegiatan ekonomi baru di pedesaan yang dapat menunjang tenaga kerja.
- Aspek permodalan/keuangan
Program kemitraan ini mensinergikan beberapa kepentingan dalam kerangka kemitraan sehingga

modal kerja yang ada dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi disamping itu berdasarkan hasil analisis, program kemitraan ini memberikan peningkatan pendapatan yang tinggi khususnya bagi ketiga KUB yang melakukan program kemitraan. Bagi petani merupakan nilai tambah tersendiri untuk berlatih tentang manajemen keuangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan agar KUB tetap berjalan secara berkesinambungan.

- Aspek teknis
Lokasi/lahan petani, letak lahan kini lebih dapat dianalisis lebih jauh untuk untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis bagi petani.
- Aspek kepastian hukum bagi petani
kepastian hukum petani meliputi status kepemilikan lahan dan status kerja sama lebih terjamin, semuanya diikat dalam bentuk kontrak ataupun perjanjian dengan manajemen yang bagus.
- Aspek pemasaran
Petani yang bergabung dalam tiga KUB tidak perlu lagi bingung menjual hasil produk nata mentahnya karena perusahaan dalam hal ini PT. Isimu Utama Raya menjamin akan membeli semua hasil produk

petani sesuai dengan harga yang disepakati bersama.

B. Pola Kemitraan yang terbangun pada saat melakukan program kemitraan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas dan petani berhasil didalam mengelola usahataniya, maka kehadiran salah satu perusahaan daerah yakni PT. Isimu Utama Raya dapat membantu para petani dalam pengelolaan usahataniya melalui program kemitraan agar berhasil meningkatkan pendapatannya.

Pola yang terbangun saat melakukan program kemitraan bertipe sinergi dan saling menguntungkan. Tipe ini berbasis pada kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung dan serta saling ketergantungan pada masing-masing pihak yang bermitra.

Kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh PT Isimu Utama Raya yaitu 1). Menyediakan sarana produksi berupa bibit, Za dan cuka dijual kepetani dengan harga yang rendah. 2). Memberikan bantuan peralatan seperti kompor, wajan, dan bak penampung nata decoco mentah. 3). Nata decoco mentah yang diproduksi oleh petani,. Sedangkan kegiatan kemitraan dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam tiga kelompok usaha bersama yaitu penyediaan air kelapa dan gula.

PT. Isimu Utama Raya dalam hal kemitraan ini bertindak sebagai perusahaan pembimbing pada kelompok usaha bersama persoalan yang dihasilkan oleh petani adalah tanggung jawab pihak perusahaan, karena nata decoco mentah itu adalah bagian produk yang akan dijual oleh perusahaan. Petani membuat nata decoco mentah dengan ukuran dan kualitas yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, sedangkan perusahaan menangani kegiatan pemasaran dalam bentuk minuman segar nata decoco. Semua produk nata decoco. Semua produk nata decoco mentah yang dihasilkan petani dijual ke perusahaan dengan harga Rp. 1000/Kg nata decoco mentah. Kerja sama ini dapat meningkatkan produksi karena kesediaan sarana produksi yang pasti dan jaminan harga serta pasar dari pihak perusahaan (PT. Isimu Utama Raya). Dengan melihat kerja sama seperti diatas maka pola kemitraan yang dibangun oleh petani yang terbangun dalam tiga kelompok usaha bersama dengan pihak perusahaan dikata gorikan sebagai pola Inti Plasma karena perusahaan inti menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengelola serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu petani sebagai Plasma bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan

persyaratan yang telah disepakati seperti pembuatan nata mentah.

Program kemitraan yang dibangun oleh perusahaan pembuat nata decoco (PT. Isimu Utama Raya) dengan petani yang tergabung dalam tiga kelompok usaha bersama lebih ditunjukkan kepada pemasaran produ nata decoco dalam bentuk minuman segar, dengan dukungan pengadaan atau produksi lembaran-lembaran nata mentah dari petani. Orientasi pasar yang menjadi focus perhatian pihak perusahaan memiliki inflikasi yang riel terhadap peningkatan pendapatan petani karena semakin banyak produk dari perusahaan terjual ke pasar maka semakin besar permintaan perusahaan terhadap produk lembaran nata mentah dari petani.

Secara umum, petani plasma sangat tergantung pada perusahaan inti untuk mengelola usahanya melalui program kemitraan agribisnis secara hipotesis, ketergantungan tersebut terjadi karena keterbatasan modal usaha dan teknologi yang dikuasai petani plasma serta resiko kegagalan dalam pembuatan nata mentah. Dari sisi penggunaan modal usaha dan teknologi, pengembangan agribisnis membutuhkan modal yang besar dan teknologi maju yang cukup tinggi, paling tidak dalam manajemen usaha. Selain dari itu, keterbatasab modal yang dimiliki memaksa petani plasma sangat

berhati-hati untuk menanamkan modal dalam pengembangan usahanya karena resiko kegagalan yang tinggi. Gambaran tersebut cukup berguna karena akan membantu untuk memberikan latar belakang subjektif mengapa petani tidak mampu mengembangkan usahanya dan kemudian berharap bahwa program kemitraan akan dapat membantu mengembangkan usahanya melalui penggunaan modal, teknologi, mengurangi resiko kegagalan dan perusahaan inti melakukan pembinaan kepada usaha yang dilakukan oleh petani plasma. Dengan demikian, program kemitraan agribisnis merupakan alat pemacu pembangunan usahatani petani plasma karena petani plasma menghadapi keterbatasan modal, teknologi, lemahnya pembinaan usahatani dan memperkecil resiko kegagalan usahanya, sekaligus merupakan alternative yang tepat untuk peningkatan pendapatan petani.

C. Pendapatan Petani sebelum dan saat melakukan Program Kemitraan

Besarnya pendapatan petani pada agribisnis kelapa berhubungan erat dengan besarnya biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi. Pendapatan petani kelapa per bulan sebelum melakukan program kemitraan terlihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1 Pendapatan petani kelapa perbulan sebelum melakukan program kemitraan

No	KUB	Jumlah petani (orang)	Pendapatan (RP)	Presentase (%)
1.	lestari	6	178.250	35,7
2	maju	10	222.250	44,5
3	bersama Nyiur Indah	4	99.250	19,9
		20	499.750	100
Rata-rata pendapatan petani perbulan			24.987,5	

Tabel 7.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan petani kelapa yang tergabung didalam KUB Lestari sebelum melakukan program kemitraan adalah 178.250 atau sebesar 35,7 persen diman total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah dengan penerimaan sebesar 222.250. pendapatan petani kelapa yang tergabung dalam KUB Maju Bersama sebelum melakukan program kemitraan adalah 222.250 atau sebesar 44,5 persen dimana total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah 452.750 dengan penerimaan sebesar 675.000. sedangkan pendapatan petani kelapa yang tergabung dalam KUB Nyiur Indah sebelum melakukan program kemitraan adlah sebesar 99.250 atau sebesar 19.9 persen dimana

total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah 175.750 dengan penerimaan 275.000. rata-rata pendapatan petani secara simultan yang tergabung di dalam tiga KUB sebelum melakukan program kemitraan adalah sebesar 24.987,5. Rendahnya pendapatan petani sebelum melakukan program kemitraan disebabkan oleh kendala pasar. Dimana para petani secara rasional memproduksi sesuai dengan kondisi pasar. Sebab kita akui petani juga memiliki ide-ide rasional. Mereka rasional didalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang terjadi dilingkungannya, mereka rasional didalam mengatasi hambatan yang terjadi dilingkungannya dan juga mereka rasional dalam pengambilan keputusan pola usaha taninya.

Pendapatan petani kelapa per bulan saat melakukan program kemitraan terlihat pada tabel 7.2

Tabel 7.2 Pendapatan petani kelapa perbulan saat melakukan program kemitraan.

No	KUB	Jumlah Petani (Orang)	Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1	Lestari	6	1.295.000	29,8
2	Maju Bersama	10	2.090.000	48,1
3	Nyiur Indah	4	958.750	22,1
		20	4.344.250	100
Rata-rata pendapatan petani perbulan			217.212,5	

Tabel 7.2 diatas menunjukkan bahwa pendapatan petani kelapa yang tergabung didalam KUB Lestari saat melakukan program kemitraan adalah 1.295.500 atau sebesar 29,8 persen dimana total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah 1.804.500 dengan penerimaan sebesar 3.100.000. pendapatan petani kelapa yang tergabung dalam KUB Maju Bersama saat melakukan program kemitraan adalah 2.090.000 atau sebesar 48,1 persen dimana total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah 2.910.000 dengan penerimaan sebesar 5.000.000. sedangkan pendapatan petani kelapa yang tergabung dalam KUB Nyiur Indah saat melakukan program kemitraan adalah sebesar 958.750 atau sebesar 22,1 persen dimana total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah 1.291.250 dengan penerimaan 2.250.000. rata-rata penddapatan petani secara simultan yang tergabung dalam tiga KUB saat melakukan program kemitraan adalah sebesar 217.212,5 dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan dari 24.987,5 menjadi 217.212,5 atau kenaikannya sebesar 769,3 persen. Meningkatnya pendapatan saat melakukan program kemitraan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu transfer teknologi , pemodalán, pembinaan dan yang paling utama adalah jaminan pasar dari perusahaan.

Dengan adanya jaminan pasar dari perusahaan maka petani memproduksi nata mentahnya dalam jumlah yang besar. Dsamping itu prinsip-prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling mendukung dan saling ketergantungan sudah terbangun.

Dalam program kemitraan ini perusahaan mitra yaitu PT. Isimu Utama Raya sudah mendapatkan keuntungan ekonomi seperti yang diharapkan karena permintaan produk minuman segar natadecoco untuk pasaran lokal cukup besar dan juga suplai bahan baku dari petani dalam bentuk nata mentah cukup lancer sehingga model kemitraan yang dikembangkan melalui program kemitraan menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bharsyah, S. (1997). Kemutraan : Wujud Tanggung Jawab Sosial Pengusaha Besar dan Menengah Terhadap Lingkungan Media Perkebunan, Edisi no 17 Agustus 1997.
- Bappeda Provinsi Gorontalo. (2001). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2001- 2015. Pemda Provinsi Gorontalo.
- Biro Pusat Statistik (2003) Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2003, Pemda Kabupaten Gorontalo.
- Darmono, WA. (2004). Teori dan Praktek kemitraan Agribisnis. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Debertin, D.L. (1986) Agricultural Production Economics. Mac Milland Publishing Company, New York.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo (2004) Profil perkebunan Kabupaten Gorontalo
- Hafsah, M..J. (2000) Kemitraan Usaha Koperasi dan Strategi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- _____ (2004). Prospek Bisnis Ubi jalar. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Hermanto, F. (1998) Ilmu Usaha Tani Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB.

- Harrod, E. Domar. (1957). Essay on The Theory of Economic Growth. Oxpord University Press.
- Lewis, J.D. (1990). Partnership For Profit, Structuring and Managing Strategic Alliance. The Free Press, New York.
- Mubyarto. (1995) Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.
- Pratisto, Arif (2004). Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Membangun Percobaan dengan SPSS 12. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Saragih, B. (2001) Agribisnis. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- _____ (1998). Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Yayasan Mulia Persada dan PT. Survey Indonesia Bekerja Sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- .Soekartawi, A, Soeharjo, J.L Dillon dan J.B. Hardeker (1986). Ilmu usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Wilson (2004) Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis. Penebar Swadaya. Jakarta.



ideas
PUBLISHING

Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Telp./ Fax: 0435-830476

ISBN 978-602-0881-26-3

